

PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DAN KURIKULUM JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH¹

Oleh SUWITO²

Sepintas tentang Sejarah Fakultas Dakwah

Upaya pendirian Fakultas Dakwah dimulai pada tahun 1988 akan tetapi baru terwujud pada tahun 1990. Kelahiran Fakultas Dakwah ditandai dengan pelantikan Dekan Fakultas Dakwah Dr. Husnul Akib Suminto pada 30 Mei 1990. Pendirian Fakultas Dakwah merupakan realisasi dari PP Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri, Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1988.³ Sebelumnya, Dakwah merupakan salah satu Jurusan yang ada pada Fakultas Ushuluddin.

Fakultas Dakwah pada awal berdirinya memiliki Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama. Mulai tahun akademik 1993/1994 ditambah dengan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Agama. Hingga saat ini Fakultas Dakwah memiliki 4 Jurusan/Program Studi, yaitu: 1) Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2) Bimbingan dan Penyuluhan Islam, 3) Manajemen Dakwah, dan 4) Pengembangan Masyarakat Islam.

Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama mulai mewisuda lulusannya pada akhir Januari 1995 dan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Agama mulai mewisuda lulusannya pada awal Maret 1997 (Wisuda ke-43). Jurusan Manajemen Dakwah telah mulai mewisuda lulusannya pada akhir Februari 2001 (Wisuda ke-51).⁴ Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam sampai tulisan ini dibuat belum ditemukan data telah mewisuda lulusannya.

Jurusan Manajemen Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam belum ditemukan tahun berdirinya. Jika dilihat dari sisi tahun mulai mewisuda (akhir Februari 2001) dapat diperkirakan bahwa Jurusan Manajemen Dakwah berdiri sejak tahun akademik 1996/1997. Selain itu belum ditemukan pula alasan dan tahun adanya perubahan nama Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama menjadi Jurusan/PS Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam sampai tulisan ini dibuat juga belum ditemukan tahun berdirinya. Sehubungan dengan hal ini sejarah dan perkembangan Fakultas Dakwah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu disusun secara apik dan lengkap dengan mencantumkan SK pendirian masing-masing dari Dirjen Binbaga Islam (kini Bagais).

Posisi Jurusan/Program Studi

¹Bahan Keynote Speaker pada acara Semiloka Pengembangan Program Studi dan Kurikulum Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 28 Februari 2002. Diterbitkan dalam Buku "Menulis Gagasan Mempercepat Keberhasilan: Alih Status IAIN Menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2002" Penerbit Young Progressive Muslim (YPM) tahun 2019

²Pembantu Rektor Bidang Akademik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

³Baca antara lain Pidato Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Syadali pada Pelantikan Dekan Fakultas Dakwah dalam *Himpunan Pidato Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 1984-1992*, h. 109

⁴Periksa Album Wisuda IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada setiap kali upacara wisuda.

Setidaknya perlu tiga hal yang perlu dijelaskan pengertiannya, yaitu istilah Jurusan Bagian dan Program Studi. Menurut Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi diperoleh pengertian sebagai berikut:

1. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada akademi, sekolah tinggi atau fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.
2. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
3. Bagian adalah jurusan yang tidak mempunyai Program Studi. Istilah ini dalam keseharian ternyata tidak populer.

Dalam prakteknya, izin pembukaan dan akreditasi tertuju kepada Program Studi, bukan pada Bagian atau Jurusan. Dirjen Dikti Depdiknas maupun Dirjen Bagais Departemen Agama tidak mempersoalkan posisi Program Studi dalam suatu Jurusan atau bahkan Fakultas. Satu contoh Fakultas Dakwah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki Jurusan/Program Studi Ilmu Jurnalistik dan Humas selain empat Jurusan/PS seperti yang dimiliki oleh Fakultas Dakwah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurusan Antropologi dan Sosiologi oleh IAIN Bandung dimasukkan ke dalam Fakultas Ushuluddin. Jurusan/PS Teknik Informatika dan Ilmu Komunikasi dimasukkan ke Fakultas Dakwah oleh IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, sedangkan Jurusan/PS Psikologi dimasukkan ke dalam Fakultas Tarbiyah. Dalam situs IAIN Sunan Kalijaga Surabaya diperoleh informasi bahwa Jurusan/PS Psikologi, Sosiologi, dan Komunikasi dimasukkan ke dalam Fakultas Dakwah.

Pengembangan Jurusan/Program Studi

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mulai tahun akademik 2001/2002 secara nyata mendorong kepada pimpinan Fakultas/Jurusan untuk mengembangkan Program Studi. Hal ini dibuktikan bahwa dalam penyusunan anggarannya memasukkan program pembukaan Program Studi baru. Oleh karena pengurusan pembukaan Program Studi memerlukan biaya yang cukup besar maka seharusnya masing-masing Fakultas/Jurusan juga memasukkan program yang sama sehingga jika benar-benar akan dibuka Program Studi baru dapat dibiayai oleh Fakultas/Jurusan dan pihak Rektorat.

Perlu mendapat perhatian bahwa suatu Program Studi baru yang ada di IAIN hanya diperbolehkan untuk beroperasi jika telah mendapat ijin tertulis dari Dirjen Bagais Departemen Agama. Jika Program Studi yang akan dibuka berkaitan dengan tugas Dirjen Dikti Depdiknas (untuk Program Studi Umum) maka, Dirjen Bagais Depag baru akan menerbitkan ijin apabila telah mendapat rekomendasi dari Dirjen Dikti Depdiknas. Tentunya Dirjen Bagais baru akan menerbitkan surat ijin apabila telah mendapat rekomendasi dari Menpan dan Dirjen Anggaran dari Departemen Keuangan. Oleh sebab itu pengurusan suatu Program Studi sejak dimajukan sampai ada ketetapan diperlukan waktu yang cukup lama.

Selain itu, pengajuan pembukaan Program Studi harus berpedoman kepada SK Mendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi Baru dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pengalaman, pembukaan setiap Program Studi diperlukan 6 (enam) Dosen Tetap yang terdiri atas 4 alumni S1 dan 2 alumni S2 masing-masing dari Program Studi yang sama dengan Program

Studi yang akan dibuka. Pada Program Studi tertentu jumlah Dosen Tetap dapat lebih dari enam orang. Program Studi Psikologi misalnya, diwajibkan minimal 18 orang (6 Magister dan 12 S1 Psikologi).

Selain itu, pemrakarsa juga diwajibkan mengusulkan gelar akademik atau sebutan lulusan dari Program Studi yang dimajukan. Ketentuan ini didapat dari SK Mendiknas Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi, pasal III ayat 8 yang berbunyi sbb: *Penetapan jenis gelar dan sebutan serta singkatannya sesuai dengan kelompok bidang ilmu dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bersamaan dengan pemberian izin pembukaan program studi berdasarkan usul dari perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kepatutan akademik.*

Pengembangan Kurikulum

Penyusunan kurikulum sudah diberikan rambu-rambu melalui SK Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Dalam SK ini antara lain dijelaskan bahwa kurikulum memuat 5 kelompok mata kuliah sebagai berikut:

1. Kelompok MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian) yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti.;
2. Kelompok MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan) yang terdiri atas matakuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
3. Kelompok MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya) yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
4. Kelompok MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya) yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi;
5. Kelompok MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat) yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekhayalan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Sampai sekarang kurikulum nasional dengan pola di atas belum terbit. Sehubungan dengan hal ini IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta cenderung mengusulkan agar kurikulum nasional hanya berisi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh lulusan IAIN. Lainnya ditetapkan oleh IAIN masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing IAIN dapat memberikan improvisasi kurikulum yang dinilai lebih pas.

Perlu ditekankan di sini bahwa setidaknya IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sedang berbenah menuju UIN telah memiliki kebijakan agar setiap mata kuliah memuat 5 kandungan, yaitu: 1) *historical content*, 2) *theoretical content*, 3) *practical content*, 4) *case content*, dan 5) *Islamic content* (bagi mata kuliah umum) dan *social and science content* (bagi mata kuliah keislaman). Selain itu yang harus diperhatikan adalah adanya ciri khas perbedaan masing-masing Program Studi.

Dalam penetapan mata kuliah dan pembobotan sks hendaknya diterapkan asas *tidak recehan*. Setiap mata kuliah dapat diberikan bobot minimal 5 – 6 sks sehingga setiap semester mahasiswa tidak dibebani berbagai jenis mata kuliah. Bisa jadi mahasiswa dalam satu semester maksimal 4 mata kuliah.